

Aksi Kolektif untuk Melindungi Hak Properti Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Mardiana⁽¹⁾, Masteti⁽¹⁾, Lainang⁽²⁾, Rusydi Syakran⁽²⁾
archinesia@yahoo.co.id

⁽¹⁾Bidang Infrastruktur Wilayah, Bappeda Provinsi Jambi

⁽²⁾Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Adiwangsa Jambi

Abstrak

Sumberdaya alam merupakan salah satu unsur dasar pembangunan yang pemanfaatannya perlu dilakukan dengan bijaksana. Konsep dasar kegiatan pembangunan untuk melakukan hal tersebut adalah pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pendekatan pembangunan yang demikian dapat diartikan sebagai penserasipaduan antara kemampuan sumber daya alam dengan manusia agar dapat tercapai hasil yang optimal tanpa terjadi degradasi terhadap sumber daya alam. Pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang memperhatikan kelangsungan pemanfaatan sumber daya secara secara terkontrol dan memperhatikan ketersediannya dalam kondisi yang optimum.

Kata-kunci : aksi kolektif, hak properti, MBR

Pendahuluan

Desakan penduduk dan aktivitasnya akan membawa akibat pada lingkungan. Aktivitas ini akan menimbulkan emisi karbon. Dinamika otonomi daerah telah menggulirkan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dimana kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sangat luas dan namun terbatas pada Pemerintah Daerah baik itu Provinsi mau pun Kabupaten/Kota. Perubahan paradigma tersebut dapat dilihat pada beberapa hal antara lain:

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan pendekatan mengedepankan kepentingan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya baik di darat maupun di laut sesuai batas wilayah administratifnya dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pada masa sekarang pemerintah telah memberikan kebebasan pada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan masukan secara kritis dan terbuka terhadap pemerintahan. Pemberian kewenangan otonom yang luas di Kabupaten/Kota membawa aplikasi terhadap tanggung jawab atas penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang mana menjadi proporsi terbesar diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pada sisi lain dinamika yang terjadi pada masyarakat juga sangat cepat dan kadang kala tidak terlalu menguntungkan seperti:

1. Tumpang tindih atau konflik pemanfaatan ruang misalnya antara kawasan lindung dengan lokasi lokasi pertambangan.
2. Eksploitasi sumber daya misalnya hutan yang merusak kelestarian lingkungan, kerusakan daerah konservasi di hulu yang menyebabkan banjir dimusim hujan dan kekeringan di musim kemarau.
3. Meningkatkan alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis yang mengancam ketahanan pangan nasional.
4. Melebarnya kesenjangan perkembangan antar wilayah dan antar Kota Desa yang ditandai dengan konsentrasi ekonomi dan penduduk di perkotaan.

Pada masa sekarang prioritas pembangunan beralih pada ekonomi kerakyatan yang mendukung pengembangan ekonomi daerah. Paradigma yang demikian tidak hanya menyentuh sektor ekonomi tetapi juga telah menyentuh sektor dan bidang lainnya. Sering terjadi kebijaksanaan pemerintah tidak tersentuh oleh masyarakat kebanyakan. Terlepas dari kemampuan untuk dapat terlibat dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan, kelompok tersebut seringkali tidak mempunyai kapasitas yang cukup. Kerusakan ekosistem diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Adanya kegiatan *illegal logging* yang dipicu oleh diterbitkannya ijin pemanfaatan kayu rakyat yang tidak disertai dengan sistem tata usaha yang baik
2. Adanya pembangunan yang tidak terkendali
3. Konservasi kawasan hutan alam untuk pembangunan sektor lain seperti perkebunan, kegiatan pertambangan dan lainnya
4. Kegiatan pertanian yang kurang memperhatikan aspek konservasi tanah

Selain itu juga disertai belum adanya keterpaduan antar sektor, antar instansi dan kesadaran masyarakat yang rendah tentang pelestarian manfaat sumber daya alam.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di bidang sumber daya air yang antara lain berupa perubahan cara pandang terhadap fungsi air yang dari semula benda sosial menjadi benda ekonomi yang memiliki fungsi sosial.

Tulisan ini mencoba memberikan gambaran upaya yang dilakukan pemerintah terutama Pemerintah Provinsi Jambi dalam melindungi kepentingan masyarakat terutama pada kepemilikan dan akses terhadap sumber daya yang tersedia.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan paradigma kuantitatif. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran mendalam terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah terhadap akses masyarakat kepada sumber daya alam.

Hasil dan Pembahasan

Sumberdaya alam merupakan salah satu unsur dasar pembangunan yang pemanfaatannya perlu dilakukan dengan bijaksana. Konsep dasar kegiatan pembangunan untuk melakukan hal tersebut adalah pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pendekatan pembangunan yang demikian dapat diartikan sebagai penserasipaduan antara kemampuan sumber daya alam dengan manusia agar dapat tercapai hasil yang optimal tanpa terjadi degradasi terhadap sumber daya alam.

Pembangunan dan Penataan lingkungan yang baik harus memperhatikan kesesuaian dengan lingkungannya dan tidak membawa dampak buruk bagi kelestarian alam. Oleh karena itu dalam proses penataan lingkungan tersebut perlu memperhatikan berbagai faktor baik aspek-aspek fungsional mau pun ekonomi. Untuk menghindari dampak negatif maka pembangunan perlu memperhatikan unsur-unsur alam dalam tiap tahapan pembangunan.

Interaksi manusia dengan alam merupakan faktor utama yang harus diperhatikan. Hal ini menjadi perhatian yang sangat serius terutama bagi wilayah-wilayah khusus di mana pelestarian sumber daya alam dan lingkungan sudah menjadi keharusan.

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang menitikberatkan pembangunan lingkungan binaan yang ditata dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga kota dalam banyak aspek dalam suatu wawasan lingkungan hidup sehingga pada masa mendatang masih dapat memberikan wadah kehidupan di zaman mendatang.

Kebutuhan papan, fason, fasum, infrastruktur dan lainnya selalu pula berkembang sejalan dengan berkembangnya daya pikir manusia. Dalam hal ini faktor-faktor subjektif juga ikut berperan, rasa puas, kenikmatan, ego dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan tadi, kebutuhan fisik, perlu dan harus diarahkan agar tidak terjadi kekacauan dan penghilangan makna. Pada tahap ini peran peraturan dan niat baik dari semua pihak terutama aktor-aktor pelaksana

sangat besar. Di tangan mereka sebenarnya keselarasan antar komponen dapat berjalan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang lebih menitikberatkan pada kesinambungan sumberdaya. Interaksi antara sumber daya alam, manusia dan teknologi diupayakan dalam kondisi yang optimal. Sebagaimana yang dikemukakan van Pueren, manusia memasuki tahap fungsional dengan lebih melakukan pendekatan baru terhadap pemenuhan kebutuhan serta melakukan pendekatan tema-tema tradisional dengan cara-cara baru.

Kesimpulan

Pembangunan pada masa mendatang adalah pembangunan dengan lebih banyak melibatkan masyarakat. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator. Paradigma yang telah berubah ini menuntut adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik. Pemahaman bersama semua pihak dapat menunjang ke arah pembangunan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Aji, S. P., Nazarudin, & Bahar, F. F. (2020). Analisis Pengaruh Kinerja Ruas Jalan terhadap Emisi Gas Buang Karbon Monoksida (CO) pada Jalan Kolonel Abunjani, Telanai Pura, Kota Jambi. *Seminar Energi Dan Material Maju*. Jambi: Pusat Studi Energi dan Nano Material Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.
- Edyanto, C. H. (2014). Emisi Karbon sebagai Dasar Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta. *Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia*, 15(1). <https://doi.org/10.29122/jsti.v15i1.933>
- Handika, R. A., Fitriada, W., & Rodhiyah, Z. (2020). Potensi Vegetasi Hutan Kota Dalam Reduksi Emisi Karbondioksida (CO₂) Di Kota Jambi. *Biospecies*, 13(1), 23–28. <https://doi.org/10.22437/biospecies.v13i1.8463>
- Miharja, F. J., Husamah, H., & Muttaqin, T. (2018). Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau sebagai penyerap emisi gas karbon di kota dan kawasan penyangga Kota Malang. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*. <https://doi.org/10.36813/jplb.2.3.165-174>
- Suwarna, M., Saragih, G. M., & Pratomo, S. (2020). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sebagai Penyerap Gas CO₂ (Studi Kasus: Kecamatan Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Daur Lingkungan*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.33087/daurling.v3i1.39>